

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Atmosudirdjo, 1998. *Pengambilan Keputusan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Deddy Mulyadi, 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Konsep dan Aplikasi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta CV.
- Dunn, William, 1994. Ditermahkan Gandasasmita. *Publik Policy*. Jakarta. Gunung Agung.
- Edwar III. George C, 1980. *Implementing Public Policy*. Woshington. D.C. Congressional Queterly.
- Foremont Kast & James Rosenweight, 1979. *Organization and Manajemen A System Contingensi dan Approach*. Amerika Serikat. Mc Graw Hill.
- Frederickson. George, 1987. *New public Administration*. Alabama. The University Of Alabana Press;
- Ni'matul Huda, 2009. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang.
- Nugroho. Riant, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. Gramedia;
- Rachmadi, Lexy J. Moleong, 2006. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar;
- Soenarko, 2000. *Public policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya. Erlangga University Press :
- Syaukani, 2008. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Taliziduhu Ndraha, 2014. Ilmu Pemerintahan Jilid I, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIPUNPAD, Jakarta.

Thoha. Miftah, 1991. *Beberapa Aspek Kebijakan Birokrasi*. Yogyakarta. MW Mandala;

Thomas R. Dye, 2002. *Understanding Public Policy*. Toronto.

Winarno. Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Media Pressindo;

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1. Tentang Desa. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1. Tentang Desa. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1. Tentang Desa. Jakarta.

Sumber lain

Haqiqi, NA. 2016. *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung Aspirasi Masyarakat*. 2016. Diambil dari:

<http://digilib.unila.ac.id/25156/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>. (13 Juni 2018)

Walukow, Christin. 2015. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan*. _____ 2016. Diambil dari: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/12244/11824>. (13 Juni 2018)

Scorpion, Nopes. 2010. *Koordinasi Antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pulau Komang Sentajo, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi*. Vol 1. Diambil dari : <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2356> .(13 juni 2018)

Mangoto, Karlos. 2015. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*. Vol.3 No 1, April 2016. Diambil dari: <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=432397>. (13 Juni 2018)

Harnita, Andi. 2014. *Pengertian Disiplin, Kinerja*. <http://doditaku.blogspot.com/2014/02/kinerja.html>. (13 Juni 2018)